

**PENGARUH FAKTOR POLITIK DALAM PENGUNGKAPAN TRANSPARANSI
INFORMASI PADA *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH**

*(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017 -
2020)*

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Mega Mistika
2018/1804304

**AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul Skripsi : Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan
Transparansi Informasi pada *Websile* Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020)

Nama : Mega Mistika

TM/NIM : 2018/18043041

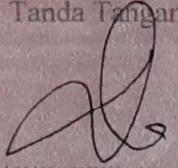
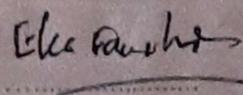
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 5 Mei 2023

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE, M. Si, Ak	1. 
2.	Anggota	Herlina Helmy, SE, M.S.Ak	2. 
3.	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH FAKTOR POLITIK DALAM PENGUNGKAPAN
TRANSPARANSI INFORMASI PADA *WEBSITE* PEMERINTAH
DAERAH

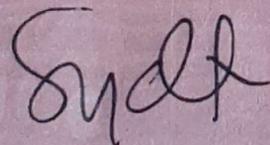
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan
Bali Periode 2017-2020)

Nama : Mega Mistika
TM/NIM : 2018/18043041
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 5 Mei 2023

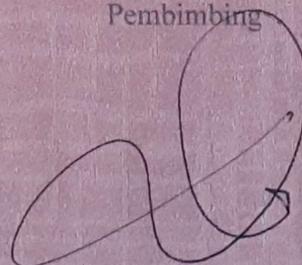
Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, M. Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Mistika
TM/NIM : 2018/18043041
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Tanjung/ 11 Juli 2000
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Aie Mondak Puncuang Anam, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman
No. HP/Telp. : 0812-6152-9171
Judul Skripsi : Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi pada *Website* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 5 Mei 2023
Saya yang menyatakan

Mega Mistika
NIM. 18043041

ABSTRAK

Mistika, Mega & Deviani. (2023). Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi pada *Website* Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, (1), 1-93

Pembimbing: Dr. Deviani, SE, M. Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor politik berupa kekuatan politik dan tingkat persaingan politik terhadap transparansi informasi melalui *website* pemda di Jawa dan Bali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purpose sampling* dengan total 122 *website* pemda dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan *software IBM SPSS 23*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan tingkat persaingan politik tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Transparansi tidak berpengaruh ketika tekanan dari pihak politik dan publik tinggi. Selain itu, masyarakat harus tetap waspada terhadap informasi dari pemerintah daerah sebagai upaya untuk meminta pertanggung jawaban mereka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi pada *Website* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020). Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deviani, SE, M. Si, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta skripsi ini.
5. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi dan rasa pantang menyerah selama proses menuntut ilmu di kampus ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 13 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	14
3. Tujuan Penelitian	14
4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTKA	16
A. Kajian Teori	16
1. Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	16
2. Transparansi Informasi Pemerintah	19
3. Kompetisi Politik	21
4. Kekuatan Politik	23
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	33
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40

B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Variabel Penelitian	43
F. Alat Analisis Data	48
1. Statistik Deskriptif	48
2. Uji Asumsi Klasik	48
3. Analisis Regresi Berganda	50
4. Pengujian Hipotesis	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah	53
B. Deskripsi Variabel Penelitian	54
C. Statistik Deskriptif	68
D. Uji Asumsi Klasik.....	68
E. Analisis Regresi Berganda.....	71
F. Pengujian Hipotesis	72
G. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Keterbatasan	79
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Wilayah dengan Tingkat Korupsi Tertinggi	4
2. Sampel Penelitian	41
3. Dokumen Wajib dalam <i>Website</i> Pemda.....	43
4. Variabel dan Pengukurannya.....	48
5. Indeks Transparansi	54
6. Kekuatan Politik	59
7. Kompetisi Politik.....	63
8. Statistik Deskriptif.....	67
9. Uji Normalitas	68
10. Uji Multikolinearitas.....	69
11. Uji Heteroskedastisitas.....	70
12. Koefisien Regresi Berganda.....	71
13. Koefisien Determinasi.....	72
14. Uji F	73
15. Uji t	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	3
2. Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK.....	5
3. Kerangka Konseptual	36

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, kesadaran publik mengenai pentingnya informasi yang transparan dan akuntabel juga semakin meningkat. Ditemukannya suatu inovasi baru yang membantu masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dengan mudah dan cepat menjadi poin utama atas meningkatnya permintaan informasi terhadap para petinggi di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu media agar dapat menyalurkan informasi yang berkualitas dan mudah dipahami oleh para pengguna informasi tersebut.

Sutabri dalam Trimahardhika dan Sutinah (2017;250), mengemukakan bahwa informasi merupakan suatu data yang telah diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi pengguna. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan dengan sifat terbuka sehingga mudah untuk diakses atau didapatkan oleh masyarakat luas sebagai pengguna informasi publik tersebut. Informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintah demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah mengembangkan suatu peraturan ketika mulai digalakkannya transparansi dengan penetapan Instruksi

Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan diberlakukannya undang-undang ini salah satunya untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik berupa pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

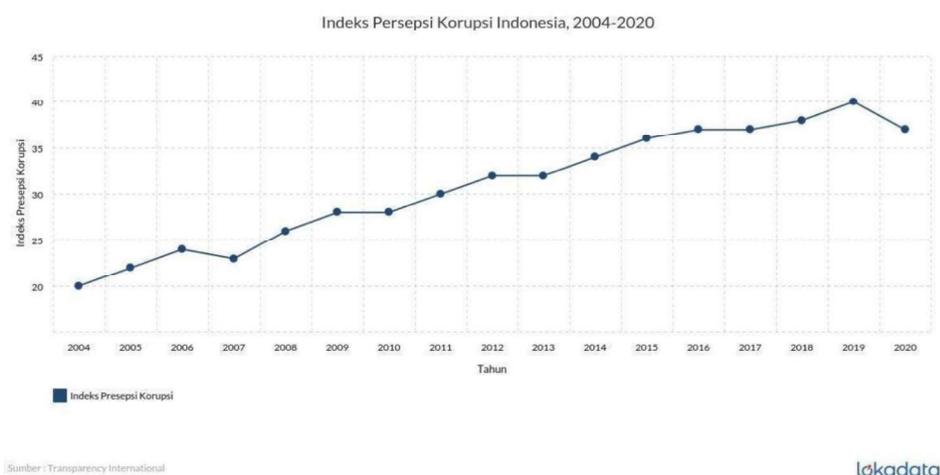
Dalam evaluasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dijelaskan bahwa kriteria keberhasilannya berupa teridentifikasinya capaian dan kendala implementasi undang-undang tersebut oleh semua kementerian/lembaga, partai politik dan pemerintah daerah. Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tolak ukur atas keberhasilan instansi terkait dalam pelaksanaan transparansi informasi.

Sebagai upaya untuk memperkuat regulasi tersebut, pemerintah kembali menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, yang menugaskan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi masing-masing daerah.

Selain itu Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta diperkuat

dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam lampiran yang tertera pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tersebut dijelaskan berbagai tindakan yang dapat dilakukan sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, khususnya dibidang pelaksanaan *e-government* dan kebutuhan informasi publik. Dengan diberlakukannya inpres ini diharapkan pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dan publik dapat terlaksana dengan baik, sehingga informasi dapat tersalurkan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102, yang mana menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 40. Pada tingkat Asean, Indonesia berada pada peringkat ke-5. Berikut data yang dihimpun oleh *Transparency International* mengenai persepsi korupsi di Indonesia tahun 2004-2020.



Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat korupsi di Indonesia paling tinggi berada pada tahun 2019 dengan angka 40,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi di Indonesia semakin memburuk.

Sementara itu, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015-2019. KPK, Kejaksaan dan Kepolisian menyatakan bahwa jumlah kasus korupsi baik dari jumlah kasus maupun tersangka untuk dua tahun terakhir mengalami penurunan. Berikut adalah 15 besar data korupsi berdasarkan wilayah menurut ICW untuk tahun 2020.

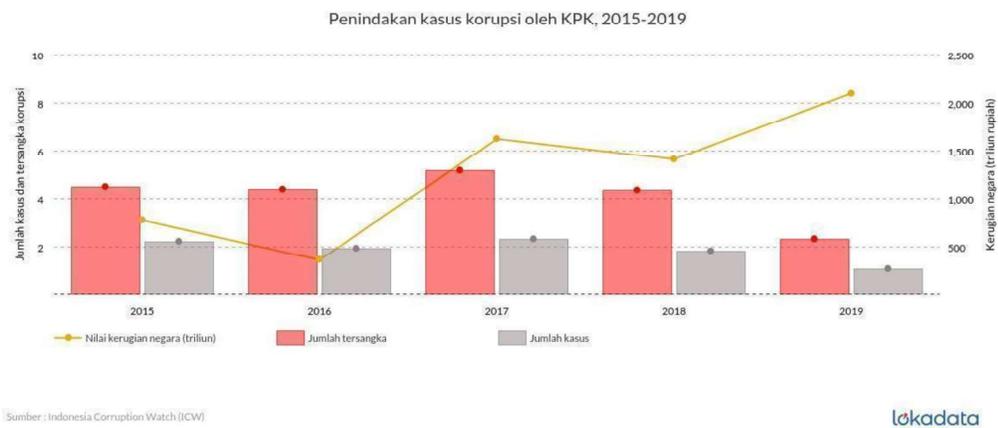
Tabel 1 Daftar Wilayah dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1.	Jawa Tengah	17	Rp 61,4 miliar
2.	Jawa Timur	16	Rp 139,2 miliar
3.	Sumatera Utara	13	Rp 24,5 miliar
4.	Jawa Barat	10	Rp 6,9 miliar
5.	Riau	9	Rp 497,5 miliar
6.	Sumatera Selatan	9	Rp 4 miliar
7.	DKI Jakarta	7	Rp 17,2 miliar
8.	Nusa Tenggara Timur	7	Rp 7,6 miliar
9.	Kep. Riau	6	Rp 1,5 miliar
10.	Sulawesi Selatan	6	Rp 2,5 miliar
11.	Kalimantan Tengah	5	Rp 2,9 miliar
12.	Kalimantan Timur	5	Rp 32 miliar
13.	Sulawesi Tenggara	5	Rp 14,9 miliar
14.	Aceh	4	Rp 1,8 miliar

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
15.	Bali	4	Rp 1,3 miliar

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar didominasi oleh pemerintah provinsi Jawa dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi khususnya keuangan pada wilayah tersebut masih sangat rendah.

Sementara itu, data yang diperoleh oleh ICW terhadap penindakan kasus korupsi oleh KPK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 2 Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK 2015-2019

Dari data tersebut dapat diperhatikan bahwa jumlah kasus maupun jumlah tersangka beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Meskipun kasus korupsi yang ditindak pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni hingga 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 tersangka, kerugian yang dialami negara justru mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 8,41 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kerugian tersebut menjadi kerugian

tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Salah satu penyebab hal ini adalah rendahnya pengungkapan transparansi informasi oleh pemerintah daerah kepada publik.

Transparansi adalah sebuah nilai fundamental dari akuntabilitas negara yang menganut sistem demokrasi, yang diwujudkan dalam reformasi administrasi (Araujo & Tejedo-Romero, 2016a). Transparansi merupakan salah satu kunci utama agar terbentuknya pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *good governance* yang merupakan cita-cita suatu negara, sehingga transparansi dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Fungsi utama dari transparansi ini adalah sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap lembaga pemerintah sebagai perwakilan yang ditunjuk untuk mengelola dana, sumber daya, serta membentuk tatanan masyarakat di Indonesia. Transparansi digunakan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik yang akan menyebabkan sejumlah gangguan.

Transparansi dipercaya sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana menjadi prinsip utama untuk meningkatkan kualitas pemerintahan atau sebagai kunci untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik sehingga membantu konsolidasi demokrasi, mencegah korupsi, memperkuat legitimasi dan meningkatkan efisiensi (Florini 2002; Birkinshaw 2006; Hood 2006; Lennon and Berg-Cross, 2010). Transparansi mampu mewujudkan beberapa hal, seperti: 1) tanggung jawab para pejabat dan petugas yang lebih efektif, 2) memperkuat pendanaan, 3) mengurangi korupsi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Kristiansen, 2006). Selain itu, struktur sosial, politik dan ekonomi dalam

masyarakat harus diatur dengan cara yang memperbolehkan masyarakat untuk berkontribusi.

Transparansi pada pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menemukan apa yang terjadi dalam organisasi sektor publik dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memposting informasi secara proaktif dalam situs web (*website*) resmi pemerintah daerah (Araujo & Tejado-Romero, 2015). Tanpa adanya transparansi pemerintah dan kebebasan dalam memperoleh informasi, akan terjadi kesulitan untuk memantau pertanggungjawaban pejabat terpilih atas tindakan yang mereka lakukan. Hal tersebut menunjukkan seberapa pentingnya pelaksanaan transparansi pada sektor publik khususnya pada pemerintahan daerah yang mempunyai kewajiban dan wewenang yang dititipkan kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan sebaik mungkin sehingga mampu membantu mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Masyarakat sejak dahulu telah mengatur kehidupan kolektif mereka dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya alam, atau keterbatasan cara dalam pendistribusian sumber daya alam tersebut agar semua warga merasa puas. Politik digunakan untuk mempermudah pendistribusian hal-hal tersebut karena politik merupakan usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta alokasi atau distribusi.

Meskipun kebijakan dan aturan melalui inpres maupun undang-undang tersebut dikeluarkan oleh negara dengan tujuan pemda melaksanakan pengungkapan transparansi pada situs *web* resmi masing-masing pemda, data pada

berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan tingkat transparansi informasi pemda masih dibawah rata-rata. Pengungkapan transparansi sebagai upaya pengawasan dan pencegahan korupsi pada pemda sebagian besar masih belum terlaksana dengan baik.

Beberapa literatur yang membahas pengungkapan transparansi di Indonesia, mengungkapkan transparansi publik oleh pemerintah daerah di Indonesia masih relatif rendah. Irwan dan Syamsul (2016) menyatakan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni hanya sebesar 16,84%. Angka ini dinyatakan rendah sesuai dengan tingkat kategori transparansi berdasarkan *International Budget Partnership (IBP)* yang mana terbagi menjadi 5 kategori skor atau persentase berupa 81-100% masuk ke dalam kategori ekstensif, skor 61-80% dinamakan kategori substansial, skor 41-60% dinamakan kategori terbatas, kategori minimal dengan skor transparansi sebesar 21-40% dan kategori sedikit dengan skor 0-20%.

Sementara itu, Martani, Nastiti & Wicaksono (2014) menyatakan nilai rata-rata publikasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah melalui *website* dalam sepuluh tahun implementasi *e-government* masih rendah, meskipun telah ditetapkan berbagai kebijakan yang mendasari kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi, serta pembentukan *website* pemda sebagai media untuk mempermudah penyampaian informasi tersebut kepada publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa tingkat transparansi informasi, khususnya melalui *website* pemda masih sangat rendah meskipun aturan dan kebijakan sudah diterbitkan sejak lama.

Dalam penelitian yang dilakukan Adiputra (2018) menjelaskan bahwa lingkungan politik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan transparansi pada tingkat pemerintah daerah. Kepala daerah sebagai pemegang jabatan politik tertinggi di suatu daerah mempunyai pemahaman atas transparansi informasi publik yang lebih baik sehingga informasi tersebut cenderung lebih transparan. Kepala daerah yang memiliki kinerja lebih baik cenderung memberikan informasi yang lebih banyak sehingga juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk memilih ulang pada pemilu selanjutnya (Gherghina, 2011). Araujo & Tejedo-Romero (2016a), del Sol (2013), dan Piotrowski & Van Ryzin (2007) meyakini terdapat adanya hubungan antara kekuatan politik yang mempengaruhi tingkat pengungkapan transparansi informasi pada pemerintah daerah. Araujo & Tejedo-Romero (2016) juga menyatakan bahwa tingkat kompetisi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi, yakni dimana semakin ketat atau tinggi suatu tingkat kompetisi politik, maka pihak politik yang berkuasa akan berusaha meningkatkan transparansi informasi untuk memperkuat posisinya.

Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam mencapai tujuannya sering bertentangan satu sama lain, baik antara sesama pejabat politik, maupun dengan masyarakat atau publik, sehingga sering terjadi konflik kepentingan. Para pengamat politik setuju bahwa tujuan tersebut dapat dicapai jika para pejabat memiliki kekuasaan pada suatu wilayah tertentu. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Dalam kata lain, faktor-faktor politik tersebut

memiliki kekuatan bagi seorang pemegang jabatan untuk mendapatkan tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai literatur transparansi informasi menunjukkan hasil bahwa ideologi para pejabat pemerintah dapat menjadi suatu kekuatan politik yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi dan transparansi. Heald (2006) dan Roberts (2006b) menunjukkan bahwa transparansi memiliki efek positif atas persepsi publik terhadap pembuat keputusan maupun hasil keputusan politik tersebut. Transparansi tersebut merupakan representatif dari pengambilan keputusan yang dinilai dapat meningkatkan legitimasi organisasi atau pemerintah daerah.

Pada teori legitimasi menyatakan bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh organisasi akan terus berusaha untuk sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi harus mampu menginformasikan kegiatan yang dilakukannya dengan jelas agar mendapatkan legitimasi masyarakat. Salah satu cara untuk menyebarkan informasi tersebut adalah dengan menyebarkannya melalui situs resmi organisasi atau instansi terkait. Sehingga pelaksanaan transparansi perlu dilakukan untuk menghindari asimetri informasi. Sementara itu, tekanan untuk menjadi lebih transparan bagi pemerintah daerah berkemungkinan diakibatkan oleh beberapa faktor politik seperti persaingan politik terkait dengan pengawasan kegiatan antar partai. Berliner & Erlich (2015) menyatakan kompetisi politik yang dianggap berperan penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi. Ketika kompetisi politik rendah atau terdapat partai yang

dominan, politisi yang menjabat cenderung merasa aman dengan posisinya sehingga merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Sebaliknya, apabila semakin ketat kompetisi politik atau tidak terdapat partai yang dominan, maka hal tersebut merupakan insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen partai politik yang berkuasa sehingga dirasakan perlu untuk meningkatkan transparansi.

Akan tetapi, semakin ketat atau tinggi kompetisi politik maka semakin tinggi resiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai yang berkuasa. Sehingga dalam situasi tingkat kompetisi yang rendah, partai yang dominan mungkin akan lebih merasa aman dengan posisinya sehingga cenderung untuk lebih membuka informasi atau lebih transparan (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012).

Transparansi dapat meningkatkan rasa kontrol publik terhadap para pejabat dengan cara membuat politisi tersebut bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan yang diinginkan oleh publik. Difusi informasi mungkin digunakan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan mengubah persepsi mereka mengenai organisasi yang juga menyebabkan meningkatnya legitimasi terhadap pejabat publik terpilih. Selain itu, menampilkan gambaran citra tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh pemda sebagai bentuk respon dalam menanggapi tekanan publik merupakan salah satu cara untuk mengamankan legitimasi dan meningkatkan reputasi dari pemerintah daerah (Pina *et al.*, 2010).

Transparansi menjadi sumber penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan menjamin pejabat untuk bertanggungjawab atas aksi serta output dari tindakan atas kebijakan yang dibentuk. Politik pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh masyarakat dengan tujuan untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apa saja yang menjadi tujuan dari pemerintahan, yang mana menyangkut pilihan antara berbagai alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan ditentukan tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya pemda yang tidak menaati regulasi mengenai transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya pengungkapan transparansi melalui *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia. Araujo (2015) menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat kekuatan yang dimiliki oleh seseorang pejabat serta tingginya tingkat persaingan yang terjadi saat pemilu ataupun pilkada untuk daerah tersebut, yang menyebabkan tingkat pengungkapan informasi atau transparansi juga semakin meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dan Kurniasari (2020) mengenai transparansi informasi pemda melalui *website*, riset tersebut menggunakan teori legitimasi (*legitimacy theory*) dan teori sinyal (*signalling theory*) pada pemerintahan yang membantu dalam proses perumusan hipotesis hingga pemilihan teknik analisis datanya. Namun, pada penelitian ini pengukuran variabel transparansi (dependen) menggunakan faktor politik (independen) yang

diambil dari komisi informasi Indonesia serta *website* lainnya yang relevan. Sampel data dalam penelitian ini berbeda ukuran dengan riset Sutaryo sebelumnya, dimana data penelitian ini menggunakan data untuk tahun 2020 yang dapat diakses melalui *website* resmi pemda selama masa penelitian dilakukan. Penelitian ini pun condong meneliti untuk elemen pemerintahan yang lebih mendetail dari penelitian sebelumnya, yakni menggunakan populasi pada 122 kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali.

Perkembangan riset mengenai transparansi saat ini juga lebih banyak berfokus pada pemerintahan pusat. Dengan memfokuskan tentang transparansi pemerintah daerah, hal tersebut dapat membantu dalam membangun pemahaman mengenai transparansi tersebut. Penggunaan sumber daya yang langka secara efisien membutuhkan mekanisme transparansi yang lebih efektif pada level pemerintahan daerah dalam proses pengambilan keputusan (Araujo & Tejedor-Romero, 2016). Pada pemerintahan daerah Indonesia, menganalisis indeks transparansi informasi dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya akan sangat membantu dalam proses pengungkapan transparansi.

Literatur mengenai pengaruh faktor politik terhadap pengungkapan transparansi di Indonesia dengan konteks pemerintah daerah saat ini masih sedikit dan memiliki berbagai keterbatasan dalam pengambilan data serta acuan literatur yang kurang memadai. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan maupun penguatan referensi terkait pengaruh faktor politik terhadap transparansi informasi pada pemda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengungkapan transparansi pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali, menjadi isu yang cukup urgen untuk diperbaiki, sehingga penting untuk meneliti transparansi informasi pemerintah daerah melalui *website* pemda tersebut, terutama yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang lebih baik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengaruh tingkat kompetisi politik terhadap pengungkapan transparansi pada kabupaten/kota yang berada di Jawa dan Bali?
2. Apakah pengaruh kekuatan politik terhadap pengungkapan transparansi pada kabupaten/kota yang berada di Jawa dan Bali?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kompetisi politik terhadap pengungkapan transparansi informasi Pemda di kabupaten/kota Jawa dan Bali.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kekuatan politik terhadap pengungkapan transparansi informasi pemerintah daerah di kabupaten/kota Jawa dan Bali.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Penulis

Dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi transparansi informasi pemerintah daerah Jawa dan Bali.

2. Pemerintah daerah

Khususnya pemerintah daerah Jawa dan Bali dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas transparansi informasi pemerintah daerah.

3. Akademis

Menambah bahan literatur dalam bentuk bukti empiris sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

4. Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah pengetahuan mengenai faktor politik yang mempengaruhi transparansi informasi di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali.